

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat)

Rieke Widasari^{1*}, Adi Susilo Jahja²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Perbanas Institute*, Jakarta Pusat, Indonesia

Email: ^{1*}rieke.widasari47@perbanas.id

(* : coresponding author)

Abstrak - Perubahan sistem kerja pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang cukup signifikan pada lembaga pemerintah khususnya pemerintah daerah. Salah satu hal yang ikut terdampak adalah kinerja keuangan daerah. Dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19 pemerintah membutuhkan strategi pelaksanaan anggaran agar dapat menjaga kinerja keuangan tetap stabil. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Barat selama sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19 (tahun 2019-2022). Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan melakukan pengamatan terhadap 5 (lima) indikator rasio kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang digunakan yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. Walaupun terdapat aspek keuangan yang mengalami penurunan cukup signifikan pada masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Keuangan, Kalimantan Barat

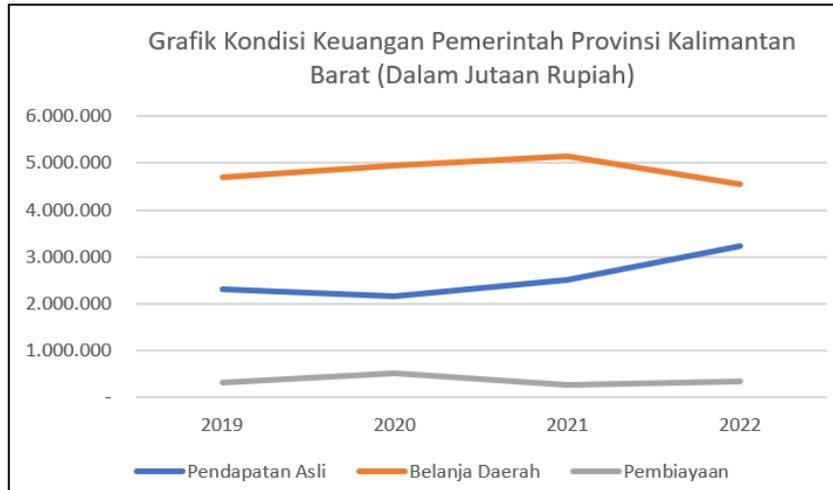
Abstract - *The changes in the working system during the Covid-19 pandemic have had a significant impact on local governments. One of the areas affected is the financial performance of regional governments. In addressing the challenges posed by the Covid-19 pandemic, governments need budget implementation strategies to ensure the stability of financial performance. This research aims to analyze and compare the financial performance of West Kalimantan Province before and after the Covid-19 pandemic (from 2019 to 2022). The study employs a quantitative descriptive method by observing five financial performance indicators of local governments. The ratios used include the fiscal decentralization ratio, regional financial independence ratio, effectiveness ratio of local own-source revenues (PAD), efficiency ratio, harmony ratio, and growth ratio. The research results indicate that, overall, West Kalimantan Province has performed relatively well in terms of financial management. However, there are aspects of finance that experienced a significant decline during the Covid-19 pandemic.*

Keywords : *Financial Performance of Local Government, Financial Ratio, West Kalimantan*

1. PENDAHULUAN

Sejak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 banyak membuat perubahan dalam sistem kerja organisasi, selain itu pandemi Covid-19 juga menyebabkan inflasi besar-besaran di negara Indonesia sehingga menyebabkan pemerintah melakukan *refocusing* anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19. *Refocusing* anggaran ini tidak hanya dilakukan pada kementerian tertentu saja tetapi dilakukan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Melalui peraturan INPRES Nomer 04 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease*, memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga melakukan pemotongan anggaran yang dimiliki untuk dipergunakan penanganan Covid-19.

Salah satu lembaga yang terdampak oleh adanya *refocusing* anggaran adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini merupakan data terkait dengan pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak sebelum pandemi Covid-19 sampai dengan setelah pandemi Covid-19 berlangsung (tahun 2019-2022).



Gambar 1. Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Sumber : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (2022)

Berdasarkan data grafik, realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan dan peningkatan yang cukup tajam dalam rentang waktu 2019-2022. Belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi setelah pandemi mengalami penurunan. Pendapatan dan belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat. Pada saat terjadi perubahan pendapatan suatu daerah maka akan mempengaruhi terhadap belanja daerah itu sendiri. Pendapatan dan belanja daerah juga memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kinerja keuangan daerah juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Fluktuasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat berdampak pada kinerja lembaga yang dapat dilihat dari analisis kinerja keuangannya.

Menurut Mokodompit et al. (2014) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning*. Lembaga sektor swasta melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan laporan laba rugi dan neraca saja tetapi berbeda dengan entitas pemerintahan yang memerlukan beberapa laporan yang dapat menjelaskan berbagai kegiatan operasional pemerintah (Rivenbark & Roenigk, 2011). Sedangkan pada lembaga sektor publik Sari et al. (2016) mendefinisikan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian dari suatu hasil kerja keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang dilakukan perhitungan dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dalam satu periode anggaran.

Dampak pandemi Covid-19 pada suatu lembaga dapat dilakukan analisis menggunakan laporan keuangan. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis status dan kinerja keuangan dimasa mendatang dengan menggunakan rasio keuangan (Amal & Wibowo, 2022). Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga menjadi penting karena laporan keuangan menyediakan informasi terkait dengan posisi keuangan suatu lembaga. Sehingga pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan (Esomar & Christianty, 2021).

Penelitian terkait dengan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Terdapat penelitian terdahulu seperti dilakukan oleh Karina and Wibowo (2022) mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menggunakan indikator rasio keuangan dengan hasil bahwa kinerja Kota Semarang mengalami penurunan selama tahun 2018-2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang paling bagus dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitar Jawa Tengah dan beberapa kota besar di Pulau Jawa seperti Kota Bandung dan Yogyakarta. Pengamatan yang dilakukan hanya berfokus pada Kota Semarang dan beberapa daerah di Pulau Jawa saja.

Peneliti Haerani and Munandar (2022) mengukur kinerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020 menggunakan rasio keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Jawa Barat untuk periode tahun 2016 hingga periode tahun 2020 menunjukkan penurunan namun secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dikatakan telah cukup baik. Meskipun demikian, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan yang cukup signifikan pada penerimaan pajak yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan daerah Jawa Barat.

Penelitian selanjutnya yang terkait dengan kinerja keuangan dilakukan oleh Rheswari and Akbar (2022). Penelitian ini menggunakan 5 (lima) rasio keuangan yang dilihat pada laporan keuangan Kabupaten Gresik. Peneliti memberikan informasi bahwa kinerja keuangan Kabupaten Gresik sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 tidak mengalami perubahan yang signifikan dan cenderung cukup baik kinerjanya. Selain studi penelitian dalam negeri, kinerja keuangan juga telah dilakukan penelitian di luar negeri. Rivenbark and Roenigk (2011) melakukan analisis terhadap *local government* pada tiga daerah negara bagian North Carolina dengan menggunakan analisis laporan keuangan setiap daerahnya. Brusca et al. (2015) melakukan penelitian kinerja keuangan *local government* menggunakan indikator ekonomi makro untuk menganalisis kondisi keuangan di Spanyol dan Italia.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya penulis belum banyak menemukan studi yang mengamati kinerja keuangan lembaga pemerintahan daerah di luar Pulau Jawa khususnya di Pulau Kalimantan selama periode pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selain itu dalam penelitian akan menjelaskan dengan detail terkait dengan indikator rasio-rasio keuangan yang digunakan, agar dampak yang ditimbulkan dari hasil rasio tergambar dengan jelas. Rasio yang akan digunakan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2019-2022 yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Rasio-rasio tersebut akan menggambarkan dengan jelas dan detail perbandingan antara kondisi tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2019-2021. Analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat melakukan evaluasi kinerja keuangan dan pemberdayaan aparatur daerah dalam menghadapi kondisi tertentu seperti saat pandemi Covid-19. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kajian yang dapat digunakan sebagai dasar implikasi praktis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih baik dalam pengelolaan APBD.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian terkait dengan analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, bertujuan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (Abdussamad, 2021). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*audited*) dan dokumen lain terkait dengan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui studi kepustakaan serta dokumentasi dengan melakukan pembedahan pada buku, literatur maupun laporan-laporan dokumen tertulis untuk menghasilkan bukti yang lebih banyak terkait dengan pelaksanaan keuangan pada Provinsi Kalimantan Barat.

2.2. Teknik Analisis

Berdasarkan sumber data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan rumus-rumus rasio keuangan. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan beberapa rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas

PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Hasil perhitungan akan dilakukan perbandingan setiap tahunnya selama periode yang ditentukan yaitu 2019-2022. Berikut ini ikhtisar cara menghitung rasio keuangan sebagai berikut ini:

Tabel 1. Tabel Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

No	Rasio	Pengukuran
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Bantuan Daerah} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$
2	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$
3	Rasio Efektivitas PAD	$\frac{\text{Biaya Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$
4	Rasio Efisiensi PAD	$\frac{\text{Biaya untuk memungut PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$
5	Rasio Keserasian	$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
6	Rasio Pertumbuhan	$\frac{\text{Pendapatan Daerah tahun ke } n - \text{Pendapatan Daerah tahun ke } n-1}{\text{Pendapatan Daerah tahun ke } n-1}$

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat telah resmi berdiri sejak 28 Januari 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomer 25 tahun 1956. Provinsi ini merupakan provinsi yang terletak diujung barat Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu Malaysia. Salah satu keistimewaan Provinsi Kalimantan Barat adalah karena dilewati oleh garis khatulistiwa (garis lintang 00). Provinsi ini merupakan provinsi terbesar keempat dengan memiliki luas sekitar 46.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Provinsi ini terdiri atas 14 kabupaten dan kota dengan persebaran penduduk berjumlah 5,46 juta jiwa (Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dihadapkan dengan kondisi sulit yang menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi (Indriani, 2023). Dampak penurunan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat diatasi dengan berbagai cara diantaranya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pelayanan publik yang terdampak oleh Covid-19. Fokus anggaran Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020-2021 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun 2019 (sebelum pandemi) dan 2022 (sesudah pandemi). Realisasi anggaran pemerintah tahun 2020-2021 pada masa Covid-19 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat dan perlindungan bidang Kesehatan. Sedangkan fokus anggaran tahun 2019 adalah mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan fokus anggaran tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2021).

3.2. Hasil Analisis Data Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal merupakan perhitungan atas kinerja keuangan yang didasarkan pada kontribusi PAD terhadap pendapatan total daerah. Menurut Mahmudi (2019) perbandingan tersebut memiliki sifat berbanding lurus, semakin tinggi kontribusi pemerintah daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Tujuan adanya desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan kesenjangan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*) (Hastuti, 2018).

Persentase rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah. Terdapat interval skala penilaian hasil rasio desentralisasi fiskal yaitu nilai rasio di bawah 10% (<10%) maka kemampuan keuangan daerah dinilai sangat kurang. Nilai rasio berada pada interval 10,01%-20% berarti kemampuan keuangan daerah dianggap kurang. Nilai rasio pada interval 20,01%-30% berarti kemampuan keuangan daerah dinilai cukup. Nilai rasio pada interval 30,01%-40% berarti kemampuan keuangan daerah dinilai sedang dan rasio diantara 40,01%-50,00% dinilai baik. Selanjutnya nilai rasio diatas 50% daerah dinilai sangat baik untuk mengelola keuangannya. Berikut ini hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tabel Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran (TA) 2019-2022

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	% Rasio derajat desentralisasi fiskal	Keterangan
2019	2.301.306.937.991,85	5.939.753.156.803,85	38,74%	Sedang
2020	2.154.145.653.806,80	5.665.113.367.860,80	38,02%	Sedang
2021	2.507.322.119.826,13	6.431.288.413.189,13	38,99%	Sedang
2022	3.217.812.121.331,21	6.103.471.493.098,21	52,72%	Sangat Baik
Rata-Rata	2.545.146.708.239,00	6.034.906.607.738,00	42,17%	Baik

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.1 diperoleh rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019-2022. Pada tahun 2019 hasil rasio desentralisasi fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan angka persentase 38,74%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan beberapa poin menjadi 38,02% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 38,99% dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 derajat desentralisasi mengalami peningkatan tajam sampai hingga mengalami perubahan kriteria dari sedang menjadi sangat baik.

Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki arti bahwa besarnya persentase kontribusi pendapatan asli daerah dari total pendapatan yang diterima oleh daerah. Secara keseluruhan rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kalimantan Barat memiliki kriteria cukup baik serta memiliki tren fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019-2022 rata-rata derajat desentralisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 42,17% berarti bahwa PAD Provinsi Kalimantan Barat berkontribusi cukup baik terhadap total pendapatan daerahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dapat memaksimalkan hasil pendapatan daerahnya dan mampu untuk mengelola urusan rumah tangga pemerintahannya dengan kemampuan sendiri.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Setiap melaksanakan kegiatan pemerintahan membutuhkan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Dalam memenuhi hal tersebut masyarakat melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Kemampuan setiap daerah untuk dapat menghidupi sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan operasional pelayanan kepada masyarakat dapat dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan (Amal & Wibowo, 2022). Semakin tinggi nilai dari rasio kemandirian keuangan suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah tersebut semakin rendah sehingga semakin mandiri daerah tersebut dalam pelaksanaan anggarannya. Hal ini berarti bahwa daerah tidak bergantung dengan sumber pendanaan eksternal karena dapat menghidupi daerahnya menggunakan penerimaan asli dari daerah masing-masing.

Perhitungan Rasio kemandirian menggambarkan pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan eksternal. Terdapat 4 (empat) pola hubungan yaitu intruktif (rasio 0-25%), konsultatif (rasio >25%-50%), partisipatif (>50%-75%), dan delegatif (>75%-100%). Selain itu rasio ini juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membiayai daerahnya yang dinilai berdasarkan kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi rasio kemandirian dan meningkatkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019-2022

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Pinjaman/ Pembiayaan	% Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2019	2.301.306.937. 991,85	3.635.394.245.3 12,00	314.906.293.031, 77	58,26%	Partisipatif
2020	2.154.145.653. 806,80	3.506.829.941.6 04,00	527.262.139.696, 17	53,40%	Partisipatif
2021	2.507.322.119. 826,13	3.878.077.915.5 57,00	258.019.167.918, 62	60,62%	Partisipatif
2022	3.217.812.121. 331,00	2.826.541.836.7 87,00	336.160.504.407, 87	101,74%	Delegatif
Rata-Rata	2.545.146.708. 239,00	3.461.710.984.8 15,00	359.087.026.263, 61	66,61%	Partisipatif

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan perhitungan tabel 3.2 diperoleh hasil bahwa tingkat kemandirian Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan konsistensi yang selalu berada diatas 50% pada rentang waktu 2019-2022. Pada tabel 3.2 ditunjukkan juga bahwa PAD Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan secara berkala dan mengalami penurunan cukup besar pada tahun 2020 akibat dari Covid-19. PAD mengalami kontraksi cukup besar akibat adanya pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat pada masa pandemi sehingga penerimaan daerah tidak dapat optimal diterima. Pada tahun 2020 juga pendapatan transfer mengalami peningkatan hampir dua kali lipat akibat adanya tambahan anggaran bantuan dari pemerintah pusat untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga terlihat pada tabel 3.2 terjadi penurunan rasio kemandirian pada tahun 2020.

Rata-rata rasio kemandirian Provinsi Kalimantan Barat dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu mencapai 66,61% hal ini menginterpretasikan bahwa pola hubungan kemandirian adalah partisipatif. Pola partisipatif adalah pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah ketika peranan pemerintah pusat semakin berkurang akibat dari kemandirian daerah otonom yang mampu untuk melaksanakan urusan otonominya sendiri (Nugroho, 2017). Pada tahun 2022 rasio kemandirian daerah mencapai 101,74% yang tergolong sangat tinggi, jauh melebihi rata-rata 4 (empat) tahun terakhir, Rasio ini menyatakan bahwa pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kriteria delegatif. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah telah benar-benar mampu mandiri menjalankan urusan otonomi daerahnya sendiri.

c. Rasio Efektivitas PAD

Setiap tahun pemerintah daerah menentukan target penerimaan anggaran. Anggaran ini telah ditentukan setahun sebelum memasuki masa anggaran. Penentuan target penerimaan anggaran ini dilakukan berdasarkan proyeksi kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi ditahun mendatang. Untuk menghitung apakah target yang telah ditetapkan efektif dapat menggunakan rasio efektivitas PAD. Rasio ini merupakan perhitungan kemampuan suatu daerah dalam mewujudkan target penerimaan yang telah disetujui berdasarkan pertimbangan potensi riil dan proyeksi kemampuan daerah.

Suatu daerah dinyatakan efektif jika rasio efektivitas mencapai 100 persen atau mencapai nilai minimal 1, hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terdapat 5 (lima) tingkatan kriteria efektivitas kinerja keuangan daerah yaitu sangat

efektif (>100%), efektif (>90%-100%), cukup efektif (>80%-90%), kurang efektif (>60%-80%), dan tidak efektif untuk nilai rasio dibawah 60%. Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran (TA) 2019-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	% Rasio Efektivitas PAD	Keterangan
2019	2.301.306.937.991,85	2.178.980.318.674,00	105,61%	Sangat Efektif
2020	2.154.145.653.806,80	2.251.717.389.433,69	95,67%	Efektif
2021	2.507.322.119.826,13	2.865.959.496.090,00	87,49%	Cukup Efektif
2022	3.217.812.121.331,21	2.883.228.824.088,00	111,60%	Sangat Efektif
Rata-Rata	2.545.146.708.239,00	2.544.971.507.071,42	100,01%	Efektif

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan perhitungan tabel 3.3 diperoleh hasil bahwa rasio efektivitas PAD mengalami fluktuasi pada periode 2019-2022. Pada tahun 2019 rasio efektivitas PAD Provinsi Kalimantan Barat mencapai 105,61%, rasio ini tergolong sangat efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95,67%, penurunan ini tidak signifikan sehingga pengelolaan penerimaan masih tergolong efektif. Tahun 2021 rasio mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 87,49%, hal ini membuat pengelolaan penerimaan dikategorikan menjadi cukup efektif. Selanjutnya pada tahun 2022, pengelolaan penerimaan mengalami perbaikan sehingga rasio penerimaan mengalami kenaikan yang cukup pesat menjadi 111,60% dan dikategorikan sangat efektif.

Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan Provinsi Kalimantan Barat secara rata-rata 4 tahun terakhir memiliki rasio sebesar 100,01%. Rasio ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian tersebut adalah usaha dari pemerintah untuk mendorong berbagai pihak untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam menggali dan merealisasikan pendapatan daerah secara maksimal. Suharlina (2019) berpendapat bahwa dengan adanya peningkatan pada PAD maka akan memberikan multiplier efek pada pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat pula. Sebagai contoh penggunaan PAD digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur kota dan kabupaten sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

d. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi penerimaan merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan besarnya belanja yang dikeluarkan dengan total penerimaan negara yang masuk ke daerah. Kinerja suatu daerah dikatakan efisien jika belanja yang dikeluarkan lebih kecil dari pada realisasi penerimaannya. Semakin besar rasio (mendekati 100%) maka dapat dikatakan efisiensi semakin kecil atau semakin buruk pengelolaan keuangan daerah tersebut (Rahman & Saputra, 2022). Semakin kecil rasio efisiensi maka menunjukkan kinerja keuangan daerah tersebut semakin baik. Pemerintah daerah harus dapat mencermati besaran belanja yang dikeluarkan untuk dapat merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga daerah tersebut dapat mengetahui dengan pasti apakah pemungutan penerimaan tersebut efisien atau tidak. Hasil perhitungan rasio efisiensi Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan pada tabel 5.

Tabel 5. Tabel Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Anggaran (TA) 2019-2022

Tahun	Total Belanja	Realisasi Penerimaan	% Rasio efisiensi Penerimaan	Keterangan
2019	4.685.285.323.79 3,45	5.939.753.156.803 ,85	78,88%	Cukup Efisien
2020	4.934.552.187.64 3,35	5.665.113.367.860 ,80	87,10%	Kurang Efisien
2021	5.156.492.758.18 6,02	6.431.288.413.189 ,13	80,18%	Kurang Efisien
2022	4.547.369.876.13 0,16	6.103.471.493.096 ,21	74,50%	Cukup Efisien
Rata - Rata	Rp4.830.925.036 .438	Rp6.034.906.607. 738	80,0%	Cukup Efisien

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3.4 rasio efisiensi Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Pada masa sebelum pandemi yaitu tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 78,88% angka tersebut masuk ke dalam kriteria cukup efisien. Pada tahun 2020-2021, selama pandemi Covid-19 tingkat efisiensi mengalami kenaikan persentase menjadi 87,10% dan 80,18% angka tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan kurang efisien. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 74,50% yang mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan mengalami perbaikan setelah masa pandemi Covid-19 berakhir.

Rata-rata rasio efisiensi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2022 sebesar 80%, rasio ini berarti bahwa daerah dapat mengelola keuangannya secara cukup efisien. Rata-rata pengeluaran belanja 4 (empat) tahun terakhir sebesar 4.830.925.036.438 dan penerimaan yang diterima daerah adalah sebesar 6.034.906.607.738. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangan dengan mengeluarkan biaya yang cukup sedikit untuk menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Rasio efisiensi mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali pada masa pandemi Covid-19, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selalu memperbaiki dan berusaha untuk mengoptimalkan belanja untuk bisa memperoleh pendapatan daerah yang lebih efisien kedepannya.

e. Rasio Keserasian

Belanja negara pada postur anggaran pendapatan belanja negara (APBN) harus mendukung target pencapaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Prioritas anggaran belanja masing-masing daerah mengalami perbedaan tergantung dari prioritas kebutuhan daerah. Rasio keserasian merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur gambaran aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan belanja secara optimal pada pos belanjanya. Perhitungan rasio keserasian dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode perhitungan yaitu menggunakan perbandingan antara belanja operasi terhadap belanja daerah atau menggunakan perbandingan antara belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan.

Hasil perhitungan rasio yang lebih rendah menyimpulkan bahwa anggaran belanja dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah. Semakin kecil rasio yang dihasilkan maka hasilnya akan semakin baik. Sejauh ini belum ada pedoman yang ideal untuk perhitungan proporsi belanja. Hal ini diakibatkan karena belanja daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika Pembangunan dan kebutuhan investasi dalam penyediaan infrastruktur masing-masing daerah (Karina & Wibowo, 2022). Hasil dari rasio keserasian dapat menyimpulkan prioritas belanja pada suatu daerah. Hasil perhitungan rasio keserasian pada Provinsi Kalimantan Barat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Tabel Hasil Perhitungan Rasio KecerAsian Tahun Anggaran (TA) 2019-2022
(Berdasarkan Belanja Operasional)

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	% Rasio KecerAsian
2019	3.813.653.832.437,24	5.677.397.310.139,45	67,17%
2020	3.967.183.227.722,35	5.879.356.339.638,35	67,48%
2021	4.227.639.006.581,00	5.156.492.768.156,02	81,99%
2022	3.542.937.437.772,38	4.547.369.878.130,16	77,91%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Tabel 7. Tabel Hasil Perhitungan Rasio KecerAsian Tahun Anggaran (TA) 2019-2022
(Berdasarkan Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	% Rasio KecerAsian
2019	871.609.747.356,21	4.685.285.323.793,45	18,60%
2020	759.257.928.664,00	4.934.552.187.643,35	15,39%
2021	927.107.860.128,00	5.156.492.758.186,02	17,98%
2022	1.003.966.693.357,78	4.547.369.876.130,16	22,08%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3.5 rasio kecerAsian Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2019-2022 dihitung menggunakan perbandingan antara belanja operasi terhadap total belanja Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat belanja operasi mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kenaikan tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 81,99%. Setelah 2021 mengalami penurunan menjadi 77,91%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa anggaran belanja Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar masih dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah atau kegiatan operasional pemerintahan. Kenaikan rasio pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa adanya kebutuhan operasional yang sangat besar. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang difokuskan pada pengendalian kasus Covid-19 dan dukungan percepatan ekonomi serta pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3.6 rasio kecerAsian Provinsi Kalimantan Barat dilakukan perhitungan dengan menggunakan perbandingan antara belanja modal terhadap belanja total daerah. Secara umum realisasi belanja modal mengalami kenaikan setiap tahunnya setelah tahun 2020. Pada Tahun 2019 rasio kecerAsian mencapai 18,60%. Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 15,39%. Setelah tahun 2020 rasio kecerAsian mengalami kenaikan terus menerus. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat melakukan perbaikan dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa belanja modal yang dapat digunakan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

f. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan indikator kinerja keuangan yang dilakukan melalui perhitungan pertumbuhan pendapatan. Rasio ini dihitung untuk melihat kemampuan daerah untuk mempertahankan keberhasilan kinerja yang telah dicapai ditahun-tahun sebelumnya. Semakin tinggi persentase rasio pertumbuhan pendapatan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut berhasil untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pemerintahannya. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Tabel Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran (TA) 2019-2022

Tahun	PADn	PADn-1	% Rasio Pertumbuhan
2019	2.301.306.937.991,85	2.194.867.823.990,63	4,85%
2020	2.154.145.653.806,80	2.301.306.937.991,85	-6,39%
2021	2.507.322.119.826,13	2.154.145.653.806,80	16,40%
2022	3.217.812.121.331,21	2.507.322.119.826,13	28,34%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3.7 rasio pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 4,85%. Tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19 cukup membuat daerah tersebut mengalami penurunan pertumbuhan menjadi negatif (*minus growth*) sebesar 6,39%. Pada tahun 2021 dan 2022 ekonomi daerah mengalami perbaikan sehingga rasio pertumbuhan daerah pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Perbandingan dari tahun sebelumnya yang mengalami *minus growth*, tahun 2021 dan 2022 rasio pertumbuhan naik menjadi 16,40% dan 28,34%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja dari Provinsi Kalimantan Barat setelah mengalami pandemi Covid-19.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan untuk menghasilkan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelum dan setelah masa Covid-19, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Barat tergolong baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari rasio desentralisasi fiskal yang menunjukkan nilai rata-rata yang baik dan mencapai nilai sangat baik pada tahun 2022. Rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata tergolong tinggi dengan pola hubungan partisipatif dan pada tahun 2022 mengalami perbaikan menjadi delegatif.

Rasio efektivitas dan efisiensi berada pada rata-rata efektif dan cukup efisien. Walaupun nilai rasio efektivitas Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya tetapi secara umum pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan efektif. Selanjutnya, berdasarkan rasio keserasian belanja Provinsi Kalimantan Barat masih memprioritaskan pengeluaran belanja daerahnya digunakan untuk kegiatan operasional dibandingkan dengan belanja modal yang memiliki manfaat jangka panjang. Selain itu, rasio pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan kearah yang lebih baik meskipun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan pertumbuhan (*minus growth*) akibat pandemi Covid-19 tetapi Provinsi Kalimantan Barat berhasil untuk meningkatkan pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

Secara umum kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebelum dan setelah Covid-19 mengalami perbaikan. Berdasarkan hasil dari perhitungan 5 (lima) rasio yang telah dilakukan pada Provinsi Kalimantan Barat dengan interval waktu 2019-2022, bisa dilakukan peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa aspek seperti efisiensi pengelolaan pendapatan daerah masih dapat ditingkatkan menjadi efektif dengan cara meningkatkan potensi penerimaan daerah dan melakukan efisiensi dalam penggunaan belanja. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan tingkat keserasian belanjanya yang saat ini masih didominasi oleh belanja operasional agar dapat mengalokasikan belanja dengan lebih seimbang antara belanja modal dan belanja operasional.

REFERENCES

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). Makassar: CV. Syakir Media Press.

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2015). Drivers for the financial condition of local government: A comparative study between Italy and Spain. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 13. [https://doi.org/10.4335/13.2.161-184\(2015\)](https://doi.org/10.4335/13.2.161-184(2015))
- Esomar, M. J. F., & Christianty, R. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor jasa di BEI. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 227–233. <https://doi.org/10.31289/jkbm.v7i2.5266>
- Haerani, N., & Munandar, A. (2022). Analisa kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2016-2020. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.25157/je.v10i1.6724>
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI*, 784–799.
- Indriani, I. K. (2023). Financial condition of local government aftermath of Covid-19 pandemic-archival analysis. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 218–235. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.200>
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Semarang sebelum dan saat pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cetakan 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mokodompit, S. P., Pangemanan, S. S., Elim, I. (2014). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 2(2), 1521–1527.
- Nugroho, P. (2017). Analisis atas kemandirian pemda dalam mengelola keuangannya. *Info Artha*, 5, 93–106. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.64>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2021, December 2). *Gubernur KALBAR Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran*. <https://kalbarprov.go.id/Berita/Gubernur-Kalbar-Dorong-Percepatan-Penyerapan-Anggaran.Html>.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. <https://kalbarprov.go.id/>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897–1913. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Rivenbark, W., & Roenigk, D. (2011). Implementation of financial condition analysis in local government. *Public Administration Quarterly*, 35, 241–267. <https://doi.org/10.2307/41506755>
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, leverage, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692.
- Suharlina, H. (2019). Kemampuan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah, investasi dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP*, 1–15.